

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan bagian dari negara di kawasan Asia Tenggara yang masih dikategorikan berkembang sebab sektor perindustriannya belum memadai sebagai negara maju. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada saat ini telah dibuka pasar bebas seperti MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang memungkinkan adanya persaingan ekonomi di seluruh kawasan Asia tenggara. Terbatasnya lapangan pekerjaan serta persaingan yang semakin ketat dan kompetitif berpotensi sebagai resiko yang harus dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat yang telah memasuki usia produktif. Semakin terbatasnya lapangan pekerjaan terus menjadi perbincangan dan menimbulkan polemik tersendiri di kalangan masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat yang telah memasuki usia produktif dituntut supaya lebih produktif dan inovatif agar mampu bersaing dengan para kompetitornya untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, sampai saat ini pemerintah terus melakukan upaya dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Salah satu media atau tumpuan yang bisa dimanfaatkan sebagai solusi untuk menangani hal tersebut yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri dengan membentuk wirausaha baru melalui program Usaha Kecil Menengah (UKM) (Ilarrahmah 2021).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan proporsi

mencapai 99% dari total unit usaha yang ada. Pada tahun 2023, jumlah pelaku usaha UMKM diperkirakan mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61%, yang setara dengan Rp9.580 triliun. Selain itu, UMKM juga menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja, yang mencakup 97% dari total angkatan kerja (Kadin.id, 2024).

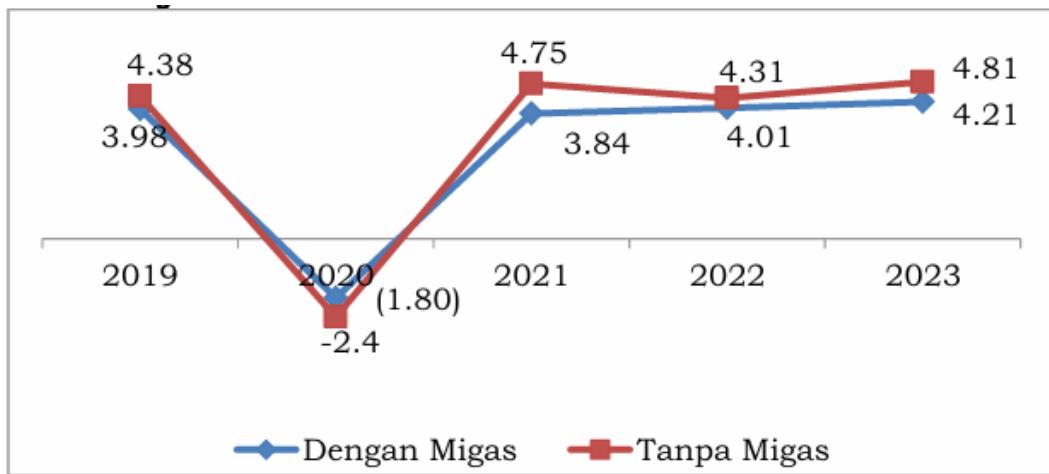
Menurut UU No 20 Tahun 2008, Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00. Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00. Sedangkan Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 masing-masing tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pada tahun 2016 jumlah pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di indonesia mencapai 57,2%, 2017 mencapai 57,1%, 2018 mencapai 57,8%, 2019 mencapai 63,9%, 2020 mencapai 37,8%, 2021 mencapai 61,79%, dengan daya serap tenaga kerja rata-rata 97% (KemenkopUKM 2021). Dilansir dari djkn.kemenkeu.go.id (2022) Resesi Ekonomi akibat pandemi telah memberikan dampak signifikan pada perekonomian nasional, terutama sektor UMKM yang menyumbang 61,1% PDB Indonesia. Dalam periode tersebut, UMKM menghadapi tantangan besar, seperti penurunan konsumsi, penurunan

belanja investasi, dan terbatasnya akses pendanaan. Hal ini membuat kinerja UMKM tertekan, yang tercermin dari menurunnya produktivitas dan daya saing.

Pemerintah merespons situasi ini dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang salah satu sasarannya adalah mendukung UMKM melalui subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan insentif perpajakan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kapasitas internal UMKM, terutama dalam pengelolaan keuangan dan adopsi teknologi digital.

Meskipun UMKM telah menerima berbagai stimulus ekonomi, banyak pelaku UMKM yang masih belum memanfaatkan bantuan ini secara optimal. Hal ini disinyalir karena keterbatasan dalam literasi keuangan, kebiasaan pengelolaan keuangan yang kurang efektif, minimnya adopsi digital payment, serta kemampuan menyusun laporan keuangan yang masih rendah. Kota Lhokseumawe juga merasakan dampak dari adanya Resesi Ekonomi akibat Pandemi terutama pada bidang ekonomi yang mengalami penurunan. Selama lima tahun terakhir (2019-2023), pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe mengalami peningkatan dari waktu ke waktu terutama tanpa migas. Namun, pertumbuhan ekonomi ini sama-sama mengalami kontraksi pada tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya (Bappeda Lhokseumawe.id, 2024). Berikut dapat dilihat seperti pada Gambar laju pertumbuhan ekonomi di Kota Lhokseumawe.



**Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023**

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka 2024

Berdasarkan pada gambar diatas, pertumbuhan ekonomi yang banyak didukung oleh kehadiran UMKM di Kota Lhokseumawe jika dilihat dari pertumbuhan ekonominya mengalami Fluktuasi. Di tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan yakni sebesar -1.80% akibat terjadinya pandemi yang masuk diseluruh indonesia sehingga sangat berdampak terhadap aktivitas transaksi jual beli. Lalu pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif menjadi sebesar 4.21% meningkat 0.2% dari tahun 2022. Perekonomian Kota Lhokseumawe tanpa migas juga mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2023, rata-rata relative tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan PRDB Migas, kecuali pada tahun 2020 mengalami Kontraksi pertumbuhan sebesar (-2.40%). Pada tahun 2021 perekonomian tanpa migas tumbuh signifikan sebesar 4.75%, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4.31% dan tahun 2023 kembali meningkat sebesar 4.81%.

Melihat permasalahan tersebut yang dialami oleh pihak UMKM di Kota Lhokseumawe yang terdaftar di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM. UMKM di Kota Lhokseumawe lebih dominan bergerak di bidang Industri dengan jumlah 3,794 Usaha Mikro 3,750 Usaha Kecil 43 dan Menengah 1, bidang perdagangan dengan jumlah sebanyak 2,812 Usaha Mikro 2,490 Usaha Kecil 275 dan Menengah 47, bidang pertanian dengan jumlah sebanyak 93 Usaha Mikro 92 dan Usaha Kecil 1, bidang perikanan dengan Jumlah sebanyak 51 Usaha Mikro 44 dan Usaha Kecil 7, bidang Transportasi dengan jumlah sebanyak 50 Usaha Mikro 15 Usaha Kecil 23 dan Usaha Menengah 12, bidang Peternakan dengan jumlah sebanyak 47 Usaha Mikro 47 (Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi ,2024). Hal ini dapat mempertahankan dan meningkatkan basis UMKM di Kota Lhokseumawe, memerlukan adanya penguatan pelatihan kinerja keuangan bagi pelaku UMKM.

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM di Kota Lhokseumawe

Sektor UMKM	Sektor Usaha	Jumlah
Mikro	Perdagangan	2.490
	Pertanian	92
	Industri	3.750
	Perikanan	44
	Transportasi	15
	Peternakan	47
Kecil	Perdagangan	275
	Pertanian	1
	Industri	43
	Perikanan	7
	Transportasi	23
Sektor UMKM	Sektor Usaha	Jumlah
Menengah	Perdagangan	47
	Industri	1
	Transportasi	12
Jumlah		6.848

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM ,2023

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, termasuk di kota lhokseumawe. Namun, UMKM sering mengalami tantangan dalam pengelolaan keuangan yang mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan usaha mereka. *Financial Literacy* yang rendah, *Financial Behavior* yang kurang tepat, serta keterbatasan dalam penggunaan *Digital Payment* dan penyusunan laporan keuangan sering menjadi kendala utama. Permasalahan yang dihadapi UMKM yang bersifat konvensional dan tidak mampu diselesaikan secara tuntas, seperti masalah kualitas SDM, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan usaha, hingga UMKM sulit bersaing dengan perusahaan yang besar. UMKM masih berorientasi jangka pendek dimana pada pengambilan keputusan usahanya. ini dapat dilihat pada kinerja UMKM dimana belum adanya konsep inovasi yang sistematis dan kegiatan inti usaha yang tidak berdiri dengan kokoh. Sehingga kinerja jangka Panjang UMKM yang berkontribusi pada industri kreatif akan selalu tetap dan tidak terarah dengan baik. Untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan UMKM untuk jangka Panjang dibutuhkan Tindakan upaya upaya strategis, seperti meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai pengelolaan keuangan dan akuntabilitas (Idawati & Pratama, 2020).

Faktor utama yang mempengaruhi Kinerja UMKM diantaranya adalah *Financial Literacy* merupakan pemahaman mengenai produk dan konsep keuangan dengan bantuan informasi dan saran, sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami risiko keuangan agar membuat keputusan

keuangan yang tepat (Hidayat & Yuningsih, 2024). Literasi keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi UMKM untuk keberlangsungan usahanya. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan akan berdampak pada kinerja serta eksistensi dan keberlangsungan usaha (Kusuma et al., 2021). Ini mempengaruhi perilaku lembaga keuangan dan karenanya berimplikasi pada stabilitas keuangan. Dan itu mempengaruhi alokasi sumber daya dalam ekonomi riil dan oleh karena itu potensi tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kemajuan teknologi turut mempengaruhi sektor keuangan di Indonesia. Munculnya berbagai industri jasa layanan keuangan seolah menjadi *trend* baru ditengah masyarakat. Secara tidak langsung, hal tersebut menjadi wujud perkembangan dunia bisnis yang terus bergerak dinamis dan pembaharuan. Secara perlahan, sektor keuangan menjadi salah satu sektor yang paling berdampak dari perkembangan teknologi dan informasi di era digital saat ini. Kolaborasi dan inovasi dari industri keuangan bisnis dengan teknologi, telah melahirkan berbagai produk teknologi dan pelayanan, salah satunya yakni hadirnya Financial Technology (*Fintech*).

Menurut Hasil penelitian Asisa (2022) berjudul, “Pengaruh Pemahaman Literasi Keuangan dan Kemudahan Digital Payment terhadap Kinerja UMKM di Kota Makassar” menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM di Kota Makassar. Hal ini disebabkan literasi keuangan memberikan kemampuan bagi pelaku UMKM untuk mengelola sumber daya keuangan secara lebih efisien, termasuk dalam hal penganggaran, pencatatan keuangan, dan pengambilan keputusan strategis. Sedangkan Menurut Hasil penelitian (Rani & Desiyanti, 2024), berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan,

Inklusi Keuangan dan Digital Payment Terhadap Kinerja UMKM Makanan & Minuman di Kota Padang” menyatakan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM makanan dan minuman di Kota Padang, hal ini disebabkan pemilik UMKM yang enggan memanfaatkan dasar pemahaman keuangan, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya literasi keuangan memberikan keuntungan melalui berbagai macam barang keuangan secara keseluruhan.

Faktor kedua yang mempengaruhi Kinerja UMKM adalah *Financial Behavior* yakni Keputusan keuangan yang baik akan menghasilkan tingkat profitabilitas yang baik pula yang disusun berdasar pada manajemen pengelolaan keuangan, perencanaan keuangan dan modal kerja serta keputusan dalam berinvestasi. UMKM berkontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Namun, jika seseorang memiliki keterampilan keuangan yang rendah atau menunjukkan perilaku keuangan yang tidak baik, hal ini dapat berdampak negatif pada keberlanjutan dan masa depan usaha tersebut (Rusnawati et al., 2022). Menurut lusardi dan Mitchell dalam Rusnawati et al., (2022) keuangan dasar Dalam merupakan tolak ukur dalam pengelolaan keuangan berdasar pada kemampuan seseorang yang menjalankan suatu usaha tersebut untuk memajukan/menumbuhkan usaha yang kompositif. Sedangkan dalam penelitian Esiebugie *at.al* (2018) menunjukan bahwa perilaku keuangan merupakan salah satu faktor utama dalam kontribusi terhadap kinerja keuangan suatu Usaha.

Menurut Hasil penelitian (Nuraeni et al., 2024), berjudul "Pengaruh Literasi Keuangan dan Perilaku Keuangan Terhadap Kinerja UMKM pada UMKM Juara" Menyatakan Bawa perilaku keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM pada UMKM Jaura hal ini disebabkan karena semakin baik perilaku keuangan para pelaku UMKM Juara Kabupaten Majalengka, maka semakin baik pula kinerja UMKM yang dihasilkannya. Sedangkan dalam penelitian (Fitria & Soejono, 2021) berjudul "Literasi keuangan, sikap keuangan dan perilaku keuangan dan kinerja UMKM" Menyatakan Bawa perilaku keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Artinya, makin baik Perilaku Keuangan tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan Kinerja usahanya.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja UMKM adalah *Digital Payment*, *Digital Payment* adalah adalah metode pembayaran secara daring dimana mengharuskan pemakai menggunakan *software* jaringan dan akun virtual yang mengubah uang tunai sebagai metode pembayaran tanpa uang tunai melalui banyak pilihan perangkat komunikasi dan sistem pembayaran tanpa uang tunai (Musthofa et al., 2020). Sementara itu, pembayaran digital juga mempengaruhi kinerja UMKM, yang menjelaskan jika pembayaran digital digunakan jumlah yang banyak atau lebih bermacam-macam maka akan berdampak positif kepada kinerja UMKM (Taufiq & Pabulo, 2023).

Menurut hasil penelitian (Rani & Desiyanti, 2024), berjudul "Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Digital Payment Terhadap Kinerja UMKM Makanan & Minuman di Kota Padang" menyatakan bahwa Digital

Payment berpengaruh positif terhadap Kinerja UMKM Makanan & Minuman di Kota Padang dimana penggunaan digital payment sangat membantu dan mempermudah transaksi selama penjualan. Menurut Hasil penelitian (Rumengan et al., 2024), Berjudul “*The Influence of Financial Literacy and Digital Payment Use Toward MSMEs Performance (Case Study: IEC UNSRAT)*” Menyatakan bahwa Digital Payment berpengaruh positif dan singnifikan terhadap kinerja UMKM dimana, penggunaan sistem pembayaran digital memudahkan proses transaksi bisnis mereka, memungkinkan proses transaksi secara efisien dan efektif, serta kredibel aman untuk digunakan baik dalam proses transaksi maupun dalam menyimpan uang. Sedangkan dalam penelitian (Bukama et al., 2024) berjudul “ Pengaruh Adopsi *E-commerce* dan *E-payment* terhadap Kinerja UMKM di Kelurahan Penanggungan” menyatakan bahwa Penggunaan digital payment tidak berpengaruh signifikan pada kinerja UMKM di kelurahan penanggungan hal ini disebabkan keterbatasan infrastruktur yang membuat banyak UMKM tidak mampu mendukung sistem pembayaran elektronik secara efisien. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam mengoperasikan e-payment sering kali menghambat adopsi teknologi ini secara maksimal.

Adanya *research gap* diatas memunculkan kesempatan bagi peneliti untuk mengajukan hipotesis dengan Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan Terhadap Kinerja UMKM. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan merupakan cerminan suatu entitas dalam melihat posisi keuangan meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas; kinerja keuangan

perusahaan atau laba rugi usaha dan ketersediaan kas. Laporan keuangan digunakan oleh berbagai pihak dalam mengambil keputusan. Pihak-pihak tersebut meliputi pihak internal (manajemen) dan pihak eksternal (kepentingan pajak, investasi, dan penyaluran kredit oleh bank). Agar dapat memenuhi tujuan penggunanya, laporan keuangan harus dibuat berkualitas sehingga dapat dipahami, relevan, andal, lengkap, dapat dibandingkan, dan disajikan tepat waktu (IAI, 2018).

Menurut FASB, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis dan ekonomi. FASB mendasarkan penyusunan tujuan pelaporan pada tiga aspek landasan pikiran, yaitu bahwa: Tujuan pelaporan keuangan ditentukan oleh lingkungan ekonomi, hukum, politik dan sosial tempat akuntansi diterapkan. Tujuan pelaporan keuangan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi yang dapat disampaikan melalui mekanisme laporan keuangan.

Pelaku UMKM yang mempunyai kemampuan menyusun laporan keuangan dengan baik sesuai standar akuntansi keuangan akan lebih bijak dalam menyalurkan dana yang dimiliki untuk memajukan usahanya tersebut dan menjadi data perhitungan dalam menentukan berapa modal yang harus dikeluarkan dan berapa keuntungan yang akan diperoleh. Sehingga untuk mencapai kinerja usaha secara berhasil perlu dilakukan penyimpanan catatan transaksi, pengelolaan keuangan, pengelolaan kredit dari laporan keuangan.

Menurut penelitian Suhendra Winarso & Kurniawati Berjudul “Pengaruh Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan, Kompetensi UMKM dan Latar belakang pendidikan terhadap Kinerja UMKM” Menyatakan bahwa Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja UMKM hal ini dikarenakan dengan memiliki kemampuan menyusun laporan keuangan maka pelaku usaha akan dapat membuat laporan keuangan secara valid dan kredibel sehingga dapat diandalkan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, evaluasi, dan perencanaan dimasa yang akan datang. Sedangkan dalam penelitian (Astriani & Dewi, 2022), Berjudul “kemampuan menyusun laporan keuangan dan motivasi sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja umkm islam di kota tegal (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Tegal)” Menyatakan bahwa Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja UMKM. Hal ini disebabkan pelaku UMKM kurang memperhatikan pengelolaan keuangan karena dampaknya tidak terlihat secara jelas terhadap kelangsungan usahanya, pelaku UMKM dalam meningkatkan kinerja usahanya lebih mengutamakan pengalaman dibandingkan membuat laporan keuangan sebagai bukti kinerjanya dan karena kurangnya dalam pengetahuan akuntansi.

Maka dari itu, dengan berdasarkan pada latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam mengenai kinerja UMKM saat ini. Sehingga peneliti mengambil dengan judul “ **Pengaruh *Financial Literacy, Financial Behavior, Digital Payment* dan Kemampuan menyusun Laporan Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kota Lhokseumawe Periode 2019-2023**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis/peneliti dapat menarik empat rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah *Financial Literacy* berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di kota Lhokseumawe Periode 2019-2023?
2. Apakah *Financial Behaviour* berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di kota Lhokseumawe Periode 2019-2023?
3. Apakah *Digital Payment* berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di kota Lhokseumawe Periode 2019-2023?
4. Apakah Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di kota Lhokseumawe Periode 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian pada skripsi ini untuk memenuhi empat tujuan, adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Literacy* terhadap Kinerja UMKM di Kota Lhokeumawe Periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Financial Behaviour* terhadap Kinerja UMKM di Kota Lhokeumawe Periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Digital Payment* terhadap Kinerja UMKM di Kota Lhokeumawe Periode 2019-2023.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemampuan laporan keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kota Lhokeumawe Periode 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman baru tentang bagaimana literasi keuangan, perilaku keuangan, pembayaran digital, dan kemampuan menyusun laporan keuangan mempengaruhi kinerja UMKM Periode 2019-2023, serta Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa dimasa depan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa Membantu Pelaku Usaha dalam memahami pentingnya literasi keuangan dan cara mengelola keuangan bisnis dengan baik, Mendorong penggunaan pembayaran digital untuk meningkatkan efisiensi usaha dan bisa Meningkatkan kemampuan menyusun laporan keuangan yang akurat untuk memudahkan akses pendanaan.
- b. Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman UMKM tentang pentingnya pengaruh Financial Literacy, Financial Behavior, Digital Payment dan Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan untuk Meningkatkan kinerja UMKM Periode 2019-2023 tersebut.